

SIARAN PERS

Seminar Forum Kajian Pembangunan (FKP) “Mengembangkan Keterampilan Digital di Indonesia”

Jakarta, 12 Oktober 2022 — Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia 2020–2024 menekankan peran transformasi digital dalam mendorong produktivitas ekonomi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah telah memiliki seperangkat peraturan yang mendorong transformasi digital (salah satunya adalah Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Akan tetapi, belum ada kerangka kebijakan yang secara khusus mengarahkan pengembangan keterampilan digital di Indonesia. Kerangka kerja ini sangat penting karena akan menentukan keberhasilan Indonesia dalam menerapkan dan memperoleh manfaat dari transformasi digital.

Pada saat yang sama, masih terdapat kesenjangan digital di antara beberapa kelompok masyarakat di negeri ini. Sebagai contoh, menurut data Susenas dan Sakernas, pada 2021 masih terdapat sekitar 36% individu usia 5 tahun ke atas yang belum mengakses internet, dan 64% pekerja/pelaku usaha usia 15 tahun ke atas belum menggunakan internet dalam pekerjaan utamanya. Oleh karena itu, sebelum menyusun kerangka kerja pengembangan keterampilan digital di Indonesia, penting bagi kita untuk mengetahui kondisi dan tantangan yang ada.

Akses internet yang berkualitas lebih banyak dinikmati masyarakat berpenghasilan tinggi

Akses masyarakat terhadap internet menentukan besar/kecilnya peluang mereka untuk mengembangkan keterampilan digital dan terintegrasi ke dalam ekosistem ekonomi digital. Akan tetapi, akses terhadap internet rupanya berkaitan dengan tingkat pendapatan masyarakat. Studi SMERU¹ menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, akses terhadap internet yang berkualitas lebih banyak dinikmati masyarakat berpenghasilan tinggi. “Pada 2020, misalnya, ada 77% masyarakat di *top income quintile* [kuintil pendapatan paling tinggi] yang memiliki akses internet, sementara hanya ada 33% masyarakat di *bottom income quintile* [kuintil pendapatan paling rendah] yang bisa mengakses internet,” ujar Jonathan Farez Satyadharma (peneliti junior SMERU).

Pada 2018, Indonesia menduduki urutan ke-71 peringkat PISA dari 79 negara di dunia. Peringkat tersebut menunjukkan bahwa hanya 30% pelajar Indonesia yang memiliki kemahiran membaca minimal pada *level* 2. Di sisi lain, pada rata-rata negara OECD, persentase ini sudah mencapai 77%. Untuk aspek *basic reading*

¹<https://smeru.or.id/en/publication/diagnostic-report-digital-skills-landscape-indonesia>.

*assessment*², hal tersebut juga menunjukkan bahwa pelajar Indonesia masih kesulitan membedakan mana yang fakta dan mana yang opini.

Bagaimana menjawab berbagai tantangan dalam hal literasi digital dan kompetensi digital?

"Tanpa keterampilan digital yang memadai, besarnya prospek ekonomi digital di Indonesia untuk merealisasikan visi Indonesia 2045 terancam hanya akan menjadi ilusi. Studi kami merekomendasikan strategi yang dapat ditempuh pemerintah untuk meningkatkan keterampilan digital di Indonesia, yaitu penduduk yang terinklusi dan memiliki literasi digital dan tenaga kerja yang memiliki kompetensi digital." Demikian Farez menambahkan.

Toolkit keterampilan digital dapat membantu penyusunan kebijakan pengembangan ekonomi digital

Adinova Fauri (peneliti CSIS) menjelaskan pentingnya keterampilan digital (*digital skills*) dan cara mengukurnya dengan menggunakan *toolkit* (perangkat) keterampilan digital. Literasi dan keterampilan digital adalah salah satu agenda prioritas yang dibahas dalam Kepresidenan Indonesia di forum G20 tahun ini. "Kami membuat *framework* yang ada saat ini menjadi lebih kaya dengan berbagai pilar dan elemen, termasuk menambahkan analisis di jenis pekerjaan yang belum ada di literasi dan *framework* yang sudah dikembangkan oleh UNESCO," ujar Adinova. *Toolkit* ini memiliki empat pilar, yakni infrastruktur, literasi, pemberdayaan, dan pekerjaan. Selain itu, pilar ini menawarkan fleksibilitas dalam implementasinya.

Tantangan pengembangan keterampilan digital di Indonesia harus segera dijawab

Termasuk dalam tantangan ini adalah penggunaan *big data* yang akurat sebagai acuan untuk menghindari ketidakcocokan antara kompetensi dan kebutuhan ekosistem ekonomi digital, peningkatan keterampilan berbasis komunitas, kesenjangan keterampilan digital, dan pelatihan secara berkala. Hedi M. Idris (Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika) memberikan tinjauan singkat terkait paparan pembicara berdasarkan praktik yang dilakukan pembuat kebijakan.

Keterampilan digital merupakan faktor kunci untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital secara keseluruhan

Keterampilan digital ketenagakerjaan merupakan aspek penting dalam ekonomi digital karena, dengan memiliki pasokan talenta digital yang memadai, sektor bisnis bisa makin mengoptimalkan produktivitas dan efisiensi bisnisnya; sektor pemerintahan bisa meningkatkan pelayanan publik; dan masyarakat bisa mengakses berbagai layanan pemerintah serta berpartisipasi dalam ekosistem ekonomi digital.

Uma Hapsari (pendiri Amazara) menjelaskan bahwa keterampilan digital minimal yang dibutuhkan seorang pelaku usaha untuk bisa sukses pada era ekonomi digital adalah memahami target pasar dan mengetahui

²penilaian keterampilan membaca dasar.

platform digital yang mereka gunakan sehari-hari. "Target pasar Amazara lebih banyak di Instagram sehingga kami memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Instagram, seperti *story telling*, dan mempelajari cara berkomunikasi dengan target pasar kita sehingga apa yang ingin kami sampaikan sampai," ujar Uma. Selain itu, Uma menyampaikan bahwa, dengan banyaknya persaingan di lokapasar (*marketplace*), sebaiknya pelaku usaha berfokus pada nilai yang bisa diberikan produk dan apa yang membuat produk tersebut berbeda dari yang lain.

Seminar "Mengembangkan Keterampilan Digital di Indonesia" merupakan bagian dari seri seminar Forum Kajian Pembangunan (FKP) 2022. SMERU kembali menjadi tuan rumah pada periode Oktober dengan menyelenggarakan empat seminar yang mengangkat empat topik terkait transformasi digital. Melalui seri seminar ini, SMERU menyampaikan hasil penelitian dan mendiskusikan agenda kebijakan untuk mendorong akselerasi peningkatan keterampilan digital di Indonesia.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi:

Ratri Indah Septiana
Kepala Bidang Komunikasi
The SMERU Research Institute
rseptiana@smeru.or.id
08161361514

Materi presentasi para pembicara dapat diunduh di: <https://smeru.or.id/id/event-id/mengembangkan-keterampilan-digital-di-indonesia>

Tentang Forum Kajian Pembangunan (FKP)

FKP adalah forum tempat para peneliti, akademisi, pakar, masyarakat sipil, komunitas internasional, dan pembuat kebijakan bertemu dan mendiskusikan hasil studi tentang isu-isu kebijakan pembangunan terkini di Indonesia. FKP diselenggarakan oleh konsorsium berbagai organisasi yang bekerja sama dengan Indonesia Project dari Australian National University (ANU). Setiap bulannya, institusi yang tergabung dalam konsorsium FKP secara bergiliran menjadi tuan rumah untuk mengadakan seri seminar FKP. Informasi lebih lanjut tentang FKP dapat dilihat di www.fkpindonesia.org.

Tentang The SMERU Research Institute (SMERU)

SMERU adalah lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian kebijakan publik. Sejak didirikan pada 2001, SMERU telah menjadi lembaga terdepan dalam melakukan kajian di bidang kemiskinan dan ketimpangan. Informasi lebih lanjut tentang SMERU dapat dilihat di www.smeru.or.id.